

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

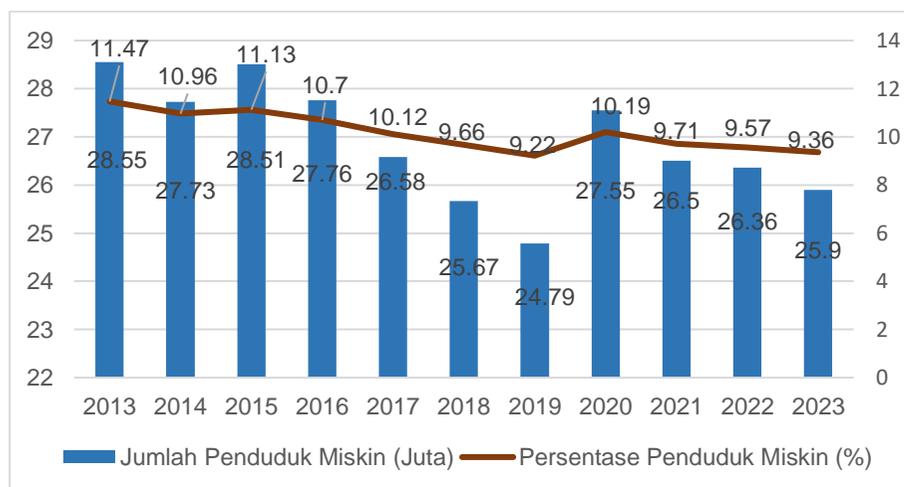
Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara, utamanya bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Setiap negara mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah kemiskinan. Begitu pentingnya isu kemiskinan untuk diatasi, PBB dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) memosisikan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan pertama “*End poverty in all its forms everywhere.*” Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, erat kaitanya dengan kemiskinan (United Nations, 2022). Agenda SDGs merupakan kelanjutan dari agenda Millenium Development Goals (MDGs) yang juga menempatkan isu kemiskinan sebagai persoalan yang pertama yang perlu untuk ditanggulangi secara global. Meskipun masalah ini telah mendapatkan perhatian sejak lama dari para ahli ekonomi maupun sosial dan bahkan berbagai bentuk kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah juga telah digulirkan, hal tersebut tidak serta merta mengurangi kemiskinan.

United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2023). Untuk menyatakan seseorang miskin dan tidak miskin, BPS menggunakan besaran rupiah yang dibelanjakan perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan yang ditetapkan dalam garis kemiskinan. Kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kalori perhari, sementara kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa lainnya. Pada Maret 2023, Badan Pusat Statistik mencatatkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp. 550.458,- perkapita perbulan yang terdiri atas garis kemiskinan makanan sebesar Rp.408.552,- (74,21 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.141.936,- (25,79 persen). Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang.

Kemiskinan di Indonesia adalah masalah yang mendesak karena memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak segera dapat diperburuk ketidakadilan sosial, menyebabkan terjadinya kelompok miskin tidak dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan, dan perumahan yang layak. Keterbatasan akses ini memperlebar ketegangan sosial dan memicu konflik antar kelompok, terutama di daerah-daerah yang memiliki kesenjangan sosial yang besar. Kondisi seperti ini dapat memperburuk kehidupan masyarakat miskin terhadap berbagai masalah sosial.



Selain itu, kemiskinan berdampak langsung pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya membatasi mereka untuk berkembang secara mandiri. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali terjebak dalam siklus kesulitan yang berkelanjutan karena ketidakmampuan mereka untuk memperbaiki kondisi hidup. Mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas hidup mereka sendiri, seperti melalui pendidikan atau pelatihan kerja. Tanpa tindakan yang tepat, kondisi ini akan terus berlangsung, menyebabkan kemiskinan menjadi masalah yang diwariskan antargenerasi, sehingga menimbulkan beban sosial yang semakin berat bagi negara.



**Gambar 1.1** Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2023

Sumber: BPS

Gambar 1.1 menunjukkan tren penduduk di bawah garis kemiskinan di Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan memang mengalami penurunan, namun penurunan ini masih belum bisa dibanggakan karena penurunannya masih dikatakan cukup lambat. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah berusaha mengatasi masalah tersebut, namun nyatanya angka tersebut belum berkurang secara signifikan sehingga masih tergolong tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 25,90 juta jiwa atau 9,36 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka

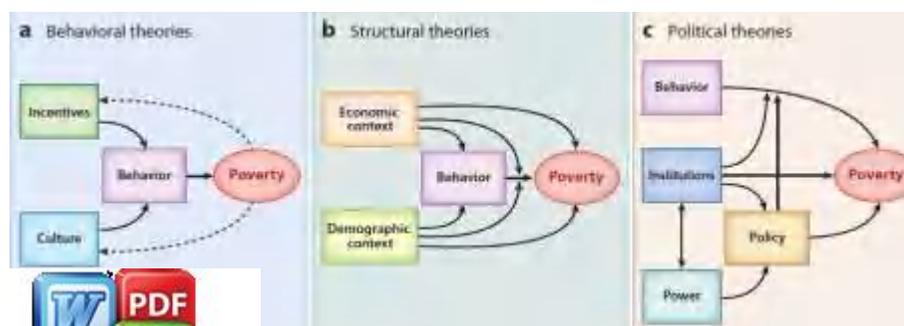


RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan pemerintah Indonesia adalah tiga puluh empat jumlah provinsi di Indonesia, terdapat enam belas di tingkat kemiskinan yang tinggi, melebihi rata-rata nasional, dan miliki tingkat kemiskinan 20 persen atau lebih yaitu: Papua, Papua jgara Timur.

Teori penyebab kemiskinan terus berkembang seiring waktu. Nurkse (1971) menyebutnya sebagai "lingkaran setan kemiskinan" atau *vicious circle of poverty*. Menurutnya, kemiskinan disebabkan oleh keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang mengakibatkan produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah ini menyebabkan pendapatan yang juga rendah, sehingga mengurangi kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Rendahnya investasi ini berkontribusi pada keterbelakangan, menciptakan siklus yang terus berulang dan membuat negara-negara miskin tetap dalam kondisi kemiskinan.

Kemudian Sen (1982) memperluas pandangan ini dengan menambahkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup akses terhadap kemampuan dan kesempatan yang setara bagi semua orang. Selanjutnya, Becker (2009) dalam teori modal manusianya juga menyatakan bahwa pendapatan yang diterima seseorang adalah penentu utama apakah seseorang tergolong miskin atau tidak. Sementara itu, Rawls (1999) menyoroti kemiskinan dari perspektif keadilan distribusi, di mana ketidakadilan dalam distribusi ekonomi dan sosial menjadi penyebab utama kemiskinan. Ia menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua orang, serta pengaturan yang memastikan kelompok yang paling tidak diuntungkan mendapatkan manfaat yang setara dalam masyarakat.

Perkembangan terbaru mengenai teori kemiskinan kemudian disampaikan oleh Brady (2019) dalam tulisannya yang berjudul "*Theories of the Causes of Poverty*", yang mengungkapkan sebagian besar teori kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok teori yang lebih luas: teori perilaku, teori struktural, dan teori politik. Teori perilaku berkonsentrasi pada perilaku individu yang didorong oleh pendapatan dan budaya. Teori struktural menekankan konteks demografi dan pasar tenaga kerja, yang menyebabkan perilaku dan kemiskinan. Teori politik berpendapat bahwa kekuasaan dan lembaga menyebabkan kebijakan, yang menyebabkan kemiskinan dan memoderasi hubungan antara perilaku dan kemiskinan.



onseptual Hubungan Kausalitas Perilaku, Struktur dan Politik



Teori perilaku (*behavioral theories*) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi akibat perilaku individu yang dipengaruhi oleh insentif dan budaya. Insentif yang tidak tepat dapat mendorong perilaku yang tidak produktif atau tidak efisien, sehingga menyebabkan atau mempertahankan kondisi kemiskinan. Selain itu, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku seseorang dalam masyarakat, di mana norma dan nilai-nilai yang dianut bisa menghambat upaya keluar dari kemiskinan. Misalnya, budaya ketergantungan pada bantuan pemerintah atau sikap pasif terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat membuat individu tetap berada dalam lingkaran kemiskinan.

Teori struktural (*structural theories*) menekankan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih luas dalam konteks ekonomi dan demografi. Konteks ekonomi mencakup kondisi makroekonomi, seperti ketersediaan pekerjaan, upah yang rendah, dan ketimpangan pendapatan, yang membatasi peluang bagi individu untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, konteks demografi, seperti usia, gender, atau komposisi rumah tangga, juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Misalnya, keluarga besar dengan banyak tanggungan atau wanita kepala keluarga lebih rentan terhadap kemiskinan. Struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil atau tidak mendukung juga memperburuk situasi kemiskinan di banyak negara.

Teori politik (*political theories*) menggarisbawahi bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh kebijakan, institusi, dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Institusi yang tidak mendukung dan kebijakan yang tidak adil atau tidak efektif bisa memperkuat kondisi kemiskinan. Selain itu, distribusi kekuasaan yang tidak merata memungkinkan kelompok-kelompok tertentu mengendalikan sumber daya ekonomi dan akses terhadap kesempatan, sementara kelompok yang lebih lemah secara politik terjebak dalam kemiskinan. Teori ini juga menyoroti bahwa perilaku, kebijakan, dan institusi saling mempengaruhi dalam menciptakan dan melanggengkan kemiskinan.

Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*) yang dikembangkan oleh Paul Romer menawarkan perspektif baru tentang bagaimana perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan melalui faktor-faktor internal seperti modal manusia, inovasi teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dalam teori ini, investasi dalam pendidikan dianggap sangat penting karena dapat meningkatkan modal manusia, yang berperan langsung dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan untuk berinovasi. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin besar kemampuan individu untuk menciptakan dan mengadopsi teknologi baru, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mampu keluar dari kemiskinan.

Penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender secara signifikan berkontribusi terhadap kemiskinan, dengan kesetaraan gender secara tidak proporsional berdampak pada perempuan. Konsep "ketahanan" menyoroti bagaimana faktor-faktor sistemik, seperti rumah tangga yang tidak setara, kekerasan terhadap perempuan, dan diskriminasi dalam rumah tangga, memperparah kemiskinan perempuan (Kaushik, 2024). Penelitian di Aceh menunjukkan



bahwa kenaikan 1% Indeks Ketidaksetaraan Gender berkorelasi dengan kenaikan kemiskinan sebesar 3,09%, yang menggarisbawahi dampak langsung dari kesenjangan gender terhadap hasil-hasil ekonomi (Nailufar et al., 2023). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan ketidaksetaraan gender memperburuk kemiskinan di Pakistan (Kanat et al., 2023). Ketidaksetaraan gender berkontribusi terhadap kemiskinan dengan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan pengambilan keputusan, sehingga memperburuk kerentanan mereka dan mengurangi potensi penghasilan mereka (Soy, 2024).

Peningkatan kesetaraan gender dapat menjadi kunci untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang persisten di suatu negara (Akbulaev & Aliyeva, 2020; Patel, 2019; Ramos et al., 2020). Beberapa penelitian internasional terbaru menyoroti isu-isu gender yang berkaitan dengan kemiskinan (Adoho & Alpaslan, 2023; Asongu & Odhiambo, 2019; Korosteleva & Stępień-Baig, 2020; Mantsurov & Khrapunova, 2019). Kesetaraan gender dapat meningkatkan hasil ekonomi dengan memberdayakan perempuan, meningkatkan partisipasi mereka dalam angkatan kerja, dan mendorong kebijakan inklusif yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Mempromosikan kesetaraan gender tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, mendorong distribusi sumber daya dan peluang yang lebih adil (C. Xu et al., 2024).

United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan tujuan kelima Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Hal ini mengartikan bahwa sudah seharusnya perempuan diberdayakan. Sejumlah kajian merekomendasikan pentingnya keterlibatan perempuan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan (Adnan & Amri, 2020; Asongu & Odhiambo, 2020; Nisak & Sugiharti, 2020). Studi lainnya telah melaporkan bahwa peningkatan pendidikan dan partisipasi tenaga kerja perempuan dipandang sebagai jalan menuju kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan (Khanie, 2019; Tsoy Marina P., 2022).

Pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, terutama bagi perempuan, dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Poin-poin berikut ini menyoroti dampak signifikan pendidikan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Sebuah studi menemukan bahwa partisipasi sekolah yang lebih tinggi untuk perempuan berdampak negatif terhadap rasio jumlah penduduk miskin (Uzonwanne, 2020). Pendidikan meningkatkan pemberdayaan perempuan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan dan pendidikan untuk keluarga mereka, yang pada akhirnya dapat



emiskinan (Wei et al., 2021). Peningkatan pendidikan perempuan  
r deviasi dikaitkan dengan penurunan tingkat kemiskinan sekitar  
, yang menunjukkan manfaat sosio-ekonomi yang lebih luas dari  
perempuan (Hong et al., 2019). Dalam rumah tangga yang dikepalai  
an menjadi prediktor penting bagi pemberdayaan ekonomi, yang  
ah tangga tersebut meningkatkan pendapatan dan ketahanan

pangan (Osinya & Juma, 2019). Pendidikan, khususnya bagi perempuan, telah diakui sebagai pendorong utama pembangunan sosial-ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Bacia, 2024).

Selain pendidikan perempuan, peran perempuan dalam kegiatan ekonomi juga berdampak pada kemiskinan, berbagai studi menyoroti dampak transformatif dari partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, terutama di negara berkembang. Partisipasi perempuan dalam bekerja dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan meningkatkan pendapatan rumah tangga di Indonesia (Nursini, M. Yuzri Zamhuri, 2021). Memberdayakan perempuan secara ekonomi dapat mengangkat seluruh keluarga dan masyarakat dari kemiskinan (Mulugeta, 2021). Di Negeria, Kewirausahaan perempuan secara signifikan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pakaian, dan perumahan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang esensial dalam rumah tangga berpenghasilan rendah (Akpor-Robaro & Afolabi, 2024). Di tingkat makro, kemiskinan terjadi karena rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output (Nursini, 2020). Dengan demikian, tenaga kerja perempuan memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga, mendorong akumulasi aset, dan mendorong kemandirian ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan di suatu wilayah, dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produktif sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi ini telah secara signifikan mengurangi kemiskinan di banyak negara berkembang (Amponsah et al., 2023; Sub-sahara et al., 2023). Pertumbuhan jangka panjang dalam produk domestik bruto (PDB) sebagian besar ditentukan oleh keterampilan penduduk suatu negara (Hanushek & Woessmann, 2021). Di tingkat makro, kemiskinan terjadi karena rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output (Nursini, 2020).

Menurut pendekatan Keynes, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan. Keynes berpendapat bahwa ketidakseimbangan ekonomi, seperti pengangguran dan inflasi, dapat mengakibatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Untuk itu, pemerintah harus berperan aktif dalam merangsang ekonomi melalui intervensi di tingkat makro ekonomi melalui kebijakan fiskal (Davis & Sanchez-Martinez, 2015). Percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sangat ditentukan oleh peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal (Nursini, 2019). Dalam konteks kemiskinan, ini berarti pemerintah perlu melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Investasi dalam pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga diperlukan untuk memastikan kapasitas dan kemungkinan masyarakat berpendidikan (Rahman et al., 2021).

Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya



menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender. Pendidikan responsif gender merujuk pada kebijakan dan praktik pendidikan yang menanggapi perbedaan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan, serta mengatasi diskriminasi gender dalam akses dan partisipasi pendidikan. Dalam konteks penyerapan tenaga kerja, penting untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk memasuki dan berkembang di dunia kerja. Pendidikan responsif gender dan penyerapan tenaga kerja responsif gender, keduanya memiliki peran penting dalam mengurangi menciptakan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Di saat isu gender dan kemiskinan semakin dibahas dan dianggap penting oleh berbagai pihak, kajian-kajian terkait hal ini di Indonesia belum secara intensif dan ekstensif untuk diulas. Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh pendidikan dan tenaga kerja yang responsif gender, serta pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan dengan variabel mediasi pertumbuhan ekonomi. Apakah variabel-variabel tersebut mampu mengatasi kemiskinan secara langsung atau akan jauh lebih efektif bila dimediasi melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan konsep ini, masalah kemiskinan diharapkan dapat ditelaah lebih rinci sehingga mampu melahirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Penelitian ini bukan hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga memiliki implikasi global dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, penyerapan tenaga kerja laki-laki, penyerapan tenaga kerja perempuan, belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, penyerapan tenaga kerja laki-laki, penyerapan tenaga kerja perempuan, serta belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan, melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan



elitian

ari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara umum hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam melengkapi kajian tentang kemiskinan
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan khususnya yang terkait dengan peran kesetaraan gender dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

### 1.5. Kerangka Konseptual

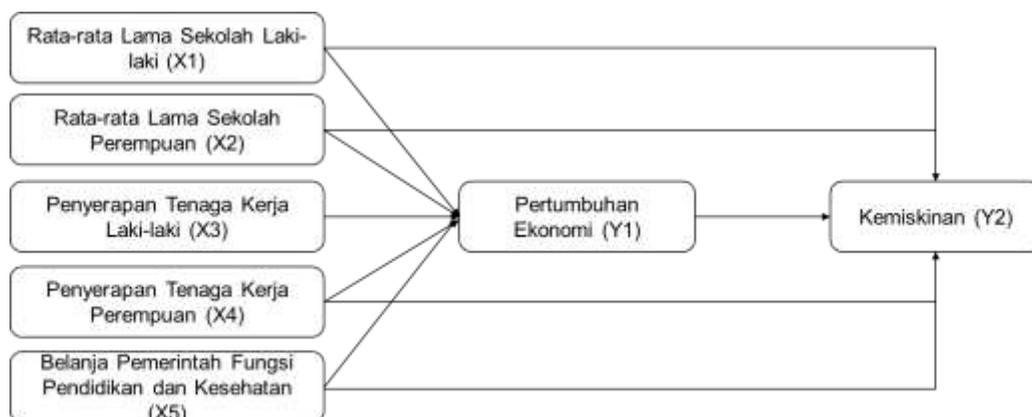
Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti rendahnya pendapatan, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta keterbatasan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi tantangan serius meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengentasan oleh pemerintah. Tingginya jumlah penduduk miskin di berbagai daerah mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih efektif untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang terpinggirkan. Fenomena kemiskinan ini tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial suatu negara.

Berdasarkan teori penyebab kemiskinan yang dikemukakan oleh Brady (2019), terdapat tiga teori utama yakni teori perilaku, teori struktural dan teori politik. Pada penelitian ini, peneliti mengambil satu variabel dari teori perilaku yaitu pendidikan. Kemudian, tiga variabel dari teori struktural yakni penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dan satu variabel yang mewakili teori politik yaitu belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan

Dalam penelitian ini, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, penyerapan tenaga kerja, dan belanja pemerintah. Rata-rata lama sekolah, baik untuk laki-laki maupun perempuan, berperan penting dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan layak. Selain itu, penyerapan tenaga kerja laki-laki dan perempuan juga merupakan indikator yang mencerminkan kapasitas ekonomi suatu wilayah. Pemerintah, melalui belanja di sektor pendidikan dan kesehatan, juga memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

Kerangka konseptual penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dari rata-rata lama sekolah, penyerapan tenaga kerja, serta belanja pemerintah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, sebagai variabel mediasi, dianggap sebagai salah satu mekanisme penting yang dapat memperkuat atau memperlemah dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap





**Gambar 1.3** Kerangka konseptual

Hipotesis penelitian:

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dan masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian teoritis dan studi empiris yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Diduga rata-rata lama sekolah laki-laki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Diduga rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Diduga penyerapan tenaga kerja laki-laki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Diduga penyerapan tenaga kerja perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
5. Diduga belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



## BAB II METODE PENELITIAN

### 2.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 34 Provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2013-2024 untuk mengetahui rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, penyerapan tenaga kerja laki-laki, penyerapan tenaga kerja perempuan, serta belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan, melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. Kemudian dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan model matematis dengan proses pengukuran sebagai hal yang krusial dengan tujuan untuk menguji teori dan membangun fakta yang ada. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, penyerapan tenaga kerja laki-laki dan perempuan, agregasi belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi.

### 2.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif, berupa data panel yaitu perpaduan antara data runtun waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Data *time series* pada penelitian ini sebanyak sembilan tahun (dari tahun 2013 sampai dengan 2022) dan data *cross section* sebanyak 34 provinsi di Indonesia, sehingga menghasilkan data panel sebanyak 340 data. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang diterbitkan secara resmi. Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka yang berasal buku maupun jurnal, yang merupakan sumber yang sangat penting.

### 2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan penelitian. Karena data penelitian ini bersumber dari data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, penyerapan tenaga kerja laki-laki dan perempuan, agregasi belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi.



#### Jenis Data

Data yang digunakan adalah metode analisis jalur (*Path Analysis*) pada data panel, yaitu kombinasi analisis deret waktu (*time-series data*) berupa 9 tahun dan deret unit (*unit-section data*) berupa data 34 provinsi di

Indonesia. Analisis jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel. Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung sejumlah variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan software *eviews* sebagai alat dalam menganalisis data.

Kerangka konseptual pada gambar 1.3 dapat dinyatakan dalam persamaan simultan untuk estimasi regresi linear dengan fungsi sebagai berikut:

$$Y_{1it} = f(X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}, X_{4it}, X_{5it}) \quad (2.1)$$

$$Y_{2it} = f(X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}, X_{4it}, X_{5it}, Y_{1it}) \quad (2.2)$$

Dimana:

$X_1$	= Rata-rata lama sekolah laki-laki (tahun)
$X_2$	= Rata-rata lama sekolah perempuan (tahun)
$X_3$	= Penyerapan tenaga kerja laki-laki (persen)
$X_4$	= Penyerapan tenaga kerja perempuan (persen)
$X_5$	= Agregasi Belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan (rupiah)
$Y_1$	= Pertumbuhan Ekonomi (persen)
$Y_2$	= Tingkat Kemiskinan (persen)
$\mu$	= Koefisien Error
$i$	= data <i>cross-section</i> (34 provinsi)
$t$	= data <i>time series</i> (tahun 2013-2022)

Berdasarkan hubungan fungsional di atas kemudian ditransformasikan menjadi model linear logaritma sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + \alpha_4 X_{4it} + \alpha_5 X_{5it} + \mu_1 \quad (2.1.a)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \mu_2 \quad (2.2b)$$

Substitusi persamaan (2.1.a) ke persamaan (2.2.b)

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 (\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \alpha_5 X_5 + \mu_1) + \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_4 + \beta_6 X_5 + \mu_1 + \mu_2$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 X_1 + \beta_1 \alpha_2 X_2 + \beta_1 \alpha_3 X_3 + \beta_1 \alpha_4 X_4 + \beta_1 \alpha_5 X_5 + \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_4 + \beta_6 X_5 + \mu_1 + \mu_2$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 X_1 + \beta_2 X_1 + \beta_1 \alpha_2 X_2 + \beta_3 X_2 + \beta_1 \alpha_3 X_3 + \beta_4 X_3 + \beta_1 \alpha_4 X_4 + \beta_5 X_4 + \beta_1 \alpha_5 X_5 + \beta_6 X_5 + \mu_1 + \mu_2$$

Persamaan tersebut dapat di ringkas menjadi:

$$Y_2 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \delta_3 X_3 + \delta_4 X_4 + \delta_5 X_5 + \mu_{12}$$



asil reduced form di atas dimana:

= Konstanta

= Pengaruh rata-rata lama sekolah laki-laki terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun

$\delta_2 = \beta_1\alpha_2 + \beta_3$	tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi = Pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
$\delta_3 = \beta_1\alpha_3 + \beta_4$	= Pengaruh penyerapan tenaga kerja laki-laki terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
$\delta_4 = \beta_1\alpha_4 + \beta_5$	= Pengaruh penyerapan tenaga kerja perempuan terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
$\delta_5 = \beta_1\alpha_5 + \beta_6$	= Pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
$\mu_{12} = \beta_1\mu_1 + \beta_2\mu_2$	= <i>Error term</i>

Berdasarkan hasil reduced form di atas, baik dari variabel eksogen maupun variabel endogen terhadap tingkat kemiskinan dapat diidentifikasi. Sehingga untuk menguji tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independe terhadap variabel dependen maka peneliti menggunakan:

a. Uji-t

Uji-t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai probabilitas  $\leq 0,05$ , maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji-F

Menurut Ghozali (2011), Uji-F menunjukkan seberapa jauh pengaruh semua variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara bersamaan (simultan). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:



- Jika nilai probabilitas (*F-statistic*) lebih dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya semua variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
- Jika nilai probabilitas (*F-statistic*) kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya semua variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variansi variabel dependen, atau seberapa besar kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yang ada. Jika nilai  $R^2$  semakin mendekati satu atau 100 persen, berarti variabel-variabel independennya mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mempengaruhi variabel dependen.

## 2.5. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan batasan penelitian yang memudahkan analisis, berikut dijabarkan beberapa definisi operasional variabel dalam penelitian ini.

1. Rata-rata lama sekolah laki-laki ( $X_1$ ) adalah waktu rata-rata yang ditempuh penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan formal. Data yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah laki-laki di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022 dalam satuan tahun.
2. Rata-rata lama sekolah perempuan ( $X_2$ ) waktu rata-rata yang ditempuh penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan formal. Data yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah perempuan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022 dalam satuan tahun.
3. Penyerapan tenaga kerja laki-laki ( $X_3$ ) adalah penduduk laki-laki yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, diukur sebagai proporsi jumlah laki-laki yang bekerja terhadap total angkatan kerja laki-laki. Data yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja laki-laki di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022 dalam satuan persen.
4. Penyerapan tenaga kerja perempuan ( $X_4$ ) adalah penduduk perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, diukur sebagai proporsi jumlah perempuan yang bekerja terhadap total angkatan kerja perempuan. Data yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja perempuan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022 dalam satuan persen.
5. Belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan ( $X_5$ ) adalah total pengeluaran pemerintah daerah untuk kebutuhan sektor pendidikan dan kesehatan. Data yang digunakan adalah total belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022 dalam satuan rupiah.
6. Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) adalah perkembangan nilai akhir barang dan jasa dari tahun ke tahun. Data yang digunakan yaitu laju pertumbuhan PDRB di 34 provinsi Indonesia tahun 2014-2022, yang diukur dalam satuan persen.
7. Tingkat Kemiskinan ( $Y_2$ ) adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Data yang digunakan adalah penduduk miskin pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022, dalam satuan persen.

